

**PENILAIAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) DALAM MENUMBUHKAN SIKAP TANGGUNGJAWAB PADA PESERTA DIDIK DI MASA PANDEMI**

Cahyono<sup>1</sup>, Dadang Mulayana<sup>2</sup>, Lili Sukarlina<sup>3</sup>, Asep Deni Normansyah<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>PPKn FKIP Universitas Pasundan

<sup>1</sup>cahyono@unpas.ac.id, <sup>2</sup>dadangmulayana@unpas.ac.id, <sup>3</sup>lilisukarlina@unpas.ac.id.

<sup>4</sup>asepdeninormansyah@unpas.ac.id

**ABSTRACT**

*The implementation of evaluation is the essence of the implementation of education and is a must and is an important note to map student achievement in the learning process and obtain feedback for students. Assessing and filling in report cards during the Covid-19 pandemic is a serious problem, apart from the learning activities themselves. Particularly related to the principles of justice (equity) and inclusivity (inclusivity). Civics learning assessment consists of attitude assessment, knowledge assessment, and skills assessment. This research was conducted to determine the PPKn Learning Assessment Planning and the PPKn learning assessment process in fostering a responsible attitude towards students during the Covid-19 pandemic. This study used a qualitative approach with a descriptive study by collecting data using interviews with 10 PPKn teachers at State Vocational Schools throughout Bandung. The conclusion of the study is that the planning of PPKn learning assessments at State Vocational High Schools in Bandung is compiled simultaneously with the making of RPPs that are adjusted to the syllabus and emergency curriculum. The implementation of the PPKn learning assessment in fostering a responsible attitude to students during the covid-19 pandemic is by applying attitude assessment and skills assessment, emphasizing the principle of feedback assessment.*

*Keywords: Learning Assessment, Pancasila and Citizenship Education (PPKn), Responsibility*

**ABSTRAK**

Pelaksanaan evaluasi ialah inti dari pelaksanaan pendidikan dan suatu keharusan untuk dilakukan serta menjadi catatan penting guna memetakan capaian siswa pada proses pembelajaran dan memperoleh *feedback* bagi siswa. Penilaian dan pengisian angka rapor pada masa pandemi covid-19 menjadi permasalahan serius, selain kegiatan pembelajaran itu sendiri. Khususnya terkait dengan prinsip keadilan (*equity*) dan inklusivitas (*inclusivity*). Penilaian pembelajaran PPKn terdiri dari penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Perencanaan Penilaian Pembelajaran PPKn dan proses penilaian pembelajaran PPKn dalam menumbuhkan sikap tanggungjawab pada peserta didik pada masa pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi deskriptif dengan pengumpulan data menggunakan wawancara kepada 10 orang guru PPKn di SMK Negeri Se-Kota Bandung. Kesimpulan penelitian yaitu perencanaan penilaian pembelajaran PPKn di SMK Negeri Kota Bandung disusun bersamaan dengan pembuatan RPP yang disesuaikan dengan silabus dan kurikulum darurat. Pelaksanaan penilaian pembelajaran PPKn dalam menumbuhkan sikap tanggungjawab pada peserta didik di masa pandemi covid-19 yaitu dengan

menerapkan penilaian sikap dan penilaian keterampilan, dengan menekankan pada prinsip penilaian bersifat umpan balik.

Kata Kunci: Penilaian Pembelajaran, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Sikap Tanggungjawab

### A. Pendahuluan

“Kurikulum 2013 Baru Hasil Revisi menghadirkan teknis Penilaian Baru Dalam Kurikulum Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 53 tahun 2020 (Permendikbud no 53 tahun 2020 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah” (Syamsir Alam, 2020). Penilaian dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidikan, dalam hal ini dapat diartikan bahwa penilaian dilakukan oleh guru maupun oleh sekolah. Salah aspek yang disoroti yaitu adanya mekanisme dan sistem pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik. Di mana penilaian oleh pendidikan dilakukan langsung oleh pendidik itu sendiri melalui proses dan mekanisme yang sudah di atur dalam Permendikbud nomor 53 tahun 2020. Penilaian tersebut tentunya dibutuhkan dan harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku, hal ini bertujuan guna mencapai dan mendapatkan hasil penilaian yang maksimal guna mencapai tujuan

pembelajaran dan dijadikan sebagai bahan dasar evaluasi pembelajaran berikutnya.

“Lingkup Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Lingkup Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan mencakup aspek pengetahuan dan aspek keterampilan” (Permendikbud No. 53, 2020). Penilaian harus senantiasa selalu mencakup semua unsur dalam tujuan pembelajaran yakni unsur afektif, kognitif, dan psikomotor peserta didik. Semua unsur tersebut harus mampu diukur oleh pendidik khususnya guna mendapatkan bahan dasar dalam menentukan langkah perbaikan pembelajaran kedepannya. Hal ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam Permendikbud No. 53 tahun 2020 yaitu “Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik adalah proses pengumpulan informasi/data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memantau proses,

kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar”.

Seperti yang kita tahu bangsa hasil penilaian merupakan dasar dari suatu keputusan kelulusan dan perbaikan sistem pembelajaran kedepan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Fitrah dan Ruslan (2020) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan evaluasi ialah inti dari pelaksanaan pendidikan dan suatu keharusan untuk dilakukan serta menjadi catatan penting guna memetakan capaian siswa pada proses pembelajaran dan memperoleh *feedback* bagi siswa. Hal tersebut jelas sangatlah penting untuk dilakukan prosedur dan mekanisme penilaian yang benar dan sesuai dengan prinsip penilaian dan aturan dalam penilaian.

Pada prinsipnya penilaian harus dilaksanakan baik oleh satuan pendidikan maupun oleh tenaga pendidik. Penilaian yang dilakukan oleh tenaga pendidik harus dilakukan oleh semua mata pelajaran baik ditingkat dasar maupun tingkat atas. Salah satu mata pelajaran yang sangat penting harus melaksanakan penilaian yang sesuai dengan prinsip dan kaidah penilaian atau evaluasi belajar yaitu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Mata pelajaran PPKn khususnya ditingkat

atas, merupakan salah satu mata pelajaran yang dapat menentukan peserta didik layak atau tidaknya untuk kejenjang atau tingkatan kelas berikutnya. Dengan kata lain mata pelajaran PPKn dalam kurikulum 2013 edisi tahun ajaran 2014 - 2015 merupakan salah satu mata pelajaran yang harus memberikan rekomendasi kepada wali kelas dan satuan pendidikan untuk memberikan pertimbangan terhadap lulus tidaknya seorang peserta didik.

Namun berdasarkan hasil evaluasi dan revisi kurikulum 2013 tahun 2019-2020, penilaian untuk memberikan kelayakan lulus atau tidaknya seorang peserta didik dibebankan pada semua mata pelajaran. Hal ini menandakan bahwa semua mata pelajaran harus mampu memberikan penilaian baik dari penilaian afektif, kognitif, maupun psikomotor peserta didik. Namun jelas apabila dihubungkan dengan tujuan dan fungsi dari mata pelajaran PPKn tugas ini sangat jelas sesuai dengan tujuan mata pelajaran PPKn yaitu menjadikan peserta didik memiliki wawasan kebangsaan dan cinta tanah air, serta menjadi warga negara yang baik dan cerdas. Indikator warga negara yang baik dan cerdas yaitu harus memiliki sikap yang baik, pengetahuan yang bagus, dan keterampilan yang

mumpuni. Untuk itu penilaian mata pelajaran PPKn harus mampu mencakup ketiga jenis penilaian tersebut yakni penilaian aspek afektif atau sikap, aspek kognitif atau pengetahuan, dan aspek psikomotor atau keterampilan (Cahyono, 2015).

Namun dalam praktiknya sejak pandemi covid-19 menyerang seluruh negara, termasuk Indonesia, telah memberikan dampak yang buruk terhadap berjalannya sistem pendidikan di Indonesia khususnya dan dunia umumnya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Fitrah dan Ruslan (2020) yang menyatakan bahwa Pandemi Covid-19 di Indonesia memberikan dampak buruk untuk tatanan kehidupan, dan salah satunya ialah domain pendidikan. Salah satu imbas dari adanya pandemi tersebut yaitu sekolah-sekolah dipaksa untuk mengadakan pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Semua sekolah dan satuan pendidikan lainnya baik yang ada di perkotaan maupun yang ada dipelosok daerah Indonesia siap tidak siap mau tidak mau harus melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk menekan angkata penularan virus covid-19 tersebut.

Penutupan sekolah secara fisik dan melaksanakan pembelajaran

secara daring atau *learning from home* tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga sudah dilakukan di beberapa negara lainnya (Lancker & Parolin, 2020; Ahmed, Allaf & Elghazaly, 2020; Nicolaa, Alsafib, Sohrabic, Kerwand, Jabird, Losifidisc, Aghae, & Agha, 2020). Studi mengenai Covid-19 yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti (Fauci, Lane, Redfield, 2020; Mehta, McAuley, Brown, Sanchez, Tattersall, Mason, 2020) mengungkapkan bahwa virus ini perlu diwaspadai karena menyebabkan sindrom pernafasan akut yang akan berdampak pada kematian (Kisno dkk., 2020).

Berdasarkan data hasil penelitian tersebut di atas, maka tepat kiranya pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap salah satunya yaitu menutup sementara pembelajaran secara langsung di setiap sekolah-sekolah di Indonesia dan menggantikannya dengan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Namun tentunya pembelajaran langsung dengan pembelajaran secara daring atau jarak jauh akan berdampak terhadap hasil belajar para peserta didik. Hal ini disebabkan karena pembelajaran dengan jarak jauh atau daring dirasakan kurang efektif karena tidak semua peserta didik dan sekolah memiliki fasilitas yang mendukung untuk

proses pembelajaran jarak jauh tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ari Suyanto (2020), yang menyatakan bahwa pembelajaran jarak jauh melalui daring di masa pandemi Covid-19 memiliki kendala tersendiri, seperti terbatasnya jaringan internet di wilayah yang tidak terjangkau sinyal internet, ketersediaan kuota internet, juga sarana prasarana yang harus dimiliki, termasuk kendala penilaian dalam pembelajaran.

Penilaian dalam pembelajaran yang dilakukan oleh para pendidik pada saat pembelajaran secara daring tentu memiliki keterbatasan. Banyak hal yang harus dilakukan oleh para pendidik untuk mencoba improvisasi dalam melaksanakan penilaian pembelajaran. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syamsir Alam (2020) yang menyatakan bahwa penilaian dan pengisian angka rapor pada masa pandemi covid-19 menjadi permasalahan serius, selain kegiatan pembelajaran itu sendiri. Khususnya terkait dengan prinsip keadilan (*equity*) dan *inklusivitas* (*inclusivity*).

Berdasarkan hal tersebut di atas, tentu semua permasalahan penilaian pada masa pandemi ini harus dicari solusi terbaiknya yang dapat dilakukan oleh para pendidik, agar prinsip-prinsip penilaian dan tujuan penilaianpun dapat

dilaksanakan dengan baik. Lebih khusus terhadap ketercapaian tujuan penilaian mata pelajaran PPKn. Dalam hal ini penilaian mata pelajaran PPKn di masa pandemi covid-19 ini diharapkan tetap memberikan dampak positif terhadap tumbuh dan berkembangnya sikap tanggungjawab pada peserta didik. Karena salah satu indikator menjadi warga negara yang baik dan cerdas, yaitu memiliki sikap tanggungjawab yang baik atau dikenal dengan sebutan *civic responsibility* artinya warga negara yang bertanggungjawab. Tanggungjawab dalam artian yaitu mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya dan mampu mempertanggungjawabkannya secara baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Burhanudin (2000) tanggung jawab adalah kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan atau tugas yang diemban dan kesanggupan untuk memikul resiko dari suatu perbuatan yang dilakukan. Memiliki kemampuan bertindak independen, mampu melihat perilaku dari segi konsekuensi atas dasar sistem nilai.

Berangkat dari uraian tersebut di atas, maka jelaslah proses dan prinsip penilaian mata pelajaran PPKn harus mampu tetap dilaksanakan dengan baik

walaupun dilaksanakan pada masa pandemi covid-19, khususnya penilaian yang dilakukan oleh guru-guru PPKn di SMK-SMK Negeri yang ada di Kota Bandung. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang perencanaan penilaian pembelajaran PPKn pada masa pandemi yang dilakukan oleh Guru PPKn di SMK Negeri Se-Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan pula untuk mengetahui proses penilaian pembelajaran PPKn dalam menumbuhkan sikap tanggungjawab pada peserta didik pada masa pandemi oleh guru PPKn di SMK Negeri Se-Kota Bandung.

## **B. Metodologi**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode studi deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data wawancara, dan analisis data menggunakan teknis triangulasi dari Miles dan Habermen. Sampel penelitian sebanyak 10 orang guru PPKn SMK Negeri yang ada di Kota Bandung.

Studi deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran dan penjelasan mengenai pelaksanaan penilaian mata pelajaran PPKn yang dilakukan oleh guru SMK Negeri yang ada di Kota Bandung Jawa Barat. Pendekatan

kualitatif digunakan untuk menganalisis keterlaksanaan penilaian dalam pembelajaran PPKn melalui wawancara dengan guru, hal ini berorientasi pada tantangan, hambatan ataupun kendala yang dihadapi guru dalam pelaksanaan penilaian pembelajaran secara daring di masa pandemi covid-19.

Wawancara dilakukan pada tanggal 9-13 November 2020 dengan responden 10 orang Guru Mata Pelajaran PPKn khususnya yang mengajar di kelas XI dengan kriteria sudah memiliki golongan IV A dan sudah lulus sertifikasi pendidik, yang dilakukan secara virtual. Wawancara dilakukan dengan menggunakan google form dan video call melalui aplikasi WhatsApp, dengan jenis wawancara terbuka. Hasil wawancara kemudian direduksi dan dianalisis kemudian dilakukan pembahasan dan penarikan kesimpulan. Pengolahan data tersebut dilakukan berdasarkan prinsip triangulasi dari Miles dan Habermen.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil pengolahan data wawancara yang dilakukan pada tanggal 14-21 November 2020, maka dapat disajikan hasil penelitian sebagai mana diuraikan di bawah ini.



## 1. Perencanaan Penilaian Mata Pelajaran PPKn

Perencanaan merupakan suatu cara untuk menentukan serangkaian tindakan untuk mengarahkan tindakan tersebut agar sesuai dengan visi (Diding Nurdin). Sedangkan menurut Ackoff menyatakan bahwa walaupun perencanaan itu merupakan suatu proses pembuatan-keputusan, perencanaan adalah jenis pembuatan keputusan khusus: (a) perencanaan merupakan sesuatu yang kita lakukan sebelum bertindak, artinya adalah pembuatan keputusan yang sifatnya antisipatif; (b) perencanaan diperlukan bila keadaan masa depan yang kita inginkan tersebut melibatkan sejumlah putusan yang saling berkaitan, artinya suatu sistem keputusan; dan (c) perencanaan merupakan suatu proses yang diarahkan untuk menghasilkan keadaan di masa depan yang diinginkan, dan tidak diharapkan muncul kecuali ada suatu tindakan yang dilakukan.

Lain halnya yang disampaikan oleh Alder (dalam Rustiadi 2008: 339), “pengertian perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya”. Hal inipun sesuai dengan yang disampaikan

oleh Irwan Indradjaja (2019) yang menyatakan bahwa tahapan dalam perencanaan terdiri dari;

- (a) Menetapkan Tujuan Pembelajaran,
- (b) Menyusun Instrumen Penilaian,
- (c) Melaksanakan Penilaian,
- (d) Menganalisis Hasil Penilaian,
- (e) Menggunakan Hasil Penilaian.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka jelas bahwa guru PPKn harus mampu membuat suatu perencanaan yang matang dalam mempersiapkan penilaian pembelajaran guna mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri dan untuk menentukan langkah perbaikan pembelajaran kedepannya. Berdasarkan ketentuan yang ada dalam permendikbud no. 53 tahun 2020 dinyatakan bahwa;

- a. perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus;
- b. penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan pengukuran pencapaian satu atau lebih Kompetensi Dasar;
- c. penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi/pengamatan sebagai sumber informasi utama dan

- pelaporannya menjadi tanggungjawab wali kelas atau guru kelas;
- d. hasil penilaian pencapaian sikap oleh pendidik disampaikan dalam bentuk predikat atau deskripsi;
  - e. penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai;
  - f. penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio, dan/atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai;
  - g. hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan oleh pendidik disampaikan dalam bentuk angka dan/atau deskripsi; dan
  - h. peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedial.

Berangkat dari penjelasan tersebut di atas, guru PPKn harus senantiasa membuat perencanaan penilaian secara optimal apapun situasi dan kondisi yang mempengaruhi suatu pembelajaran, namun penilaian harus tetap dilaksanakan secara optimal sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian belajar. Berdasarkan hasil data wawancara yang dilakukan kepada para guru PPKn SMK Negeri di Kota Bandung dapat dijelaskan bahwa perencanaan penilaian pembelajaran

mata pelajaran PPKn di masa pandemi, disesuaikan dengan kebijakan sekolah tentang pembelajaran daring namun tetap menyesuaikan dengan ketentuan kurikulum nasional khususnya tentang standar kompetensi lulusan dan standar penilaian.

Dalam hal pembuatan perencanaan penilaian, setiap guru harus punya perencanaan alternatif untuk penilaian pembelajaran yang dibuat dan disatukan dengan pembuatan RPP yang disesuaikan dengan silabus. Pembuatan perencanaan penilaian disesuaikan dengan konsep kurikulum darurat yang dilakukan oleh kesepakatan MGMP baik tingkat sekolah maupun tingkat Kota. Perencanaan penilaian pembelajaran PPKn dilakukan dengan konsep penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap diukur dengan observasi sikap siswa pada saat pembelajaran synchronous atau tatap muka virtual. Penilaian pengetahuan dengan diberikan tes, dan penilaian keterampilan dengan diberikan tugas atau proyek tertentu. Semua jenis penilaian tersebut disusun bersamaan dengan RPP yang telah disesuaikan dengan silabus dan disetujui oleh anggota MGMP sekolah masing-masing.



## 2. Penilaian Pembelajaran PPKn dalam Menumbuhkan Sikap Tanggungjawab Pada Peserta Didik

Thomas R Guskey dalam *Assessment and Grading in the Midst of a Pandemic* (Ed Week, 13 April 2020), menyatakan, “dalam masa pandemi ini, penilaian sebaiknya menitikberatkan pada umpan balik/*feedback* dari pada skor/*grading*. Penilaian sebaiknya difokuskan pada penilaian formatif, yaitu bagaimana membantu siswa memahami konsep dan materi dengan baik dan benar sehingga mereka mampu mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan”.

Jika penilaian ditekankan pada upaya mendapatkan umpan balik, sebaiknya semua bentuk penilaian adalah formatif sampai siswa memahami konsep dan materi yang diajarkan. Pada saat siswa sudah memahami, saat itu sudah bisa dikatakan sebagai penilaian sumatif. Apabila penilaian formatif diselenggarakan dengan semangat untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran, siswa pasti akan menghindari tindakan yang tidak terpuji, tidak jujur. Namun, perlu ditekankan bahwa peran umpan balik/*feedback* guru dan bagaimana teknis

mendiskusikannya bersama setiap individu/siswa dengan beragam kondisi yang mereka miliki akan sangat penting dan menentukan (Syamsir Alam, 2020).

Proses penilaian pembelajaran PPKn dalam menumbuhkan sikap tanggungjawab pada peserta didik di masa pandemi, dilakukan dengan menerapkan konsep penilaian sikap, dan keterampilan. Penilaian sikap yang dilakukan oleh guru PPKn yaitu melalui observasi/pengamatan sikap selama peserta didik mengikuti pembelajaran secara synchronous (tatap muka virtual) dengan indikator sikap tanggungjawab yaitu:

- a. Disiplin atau tetap waktu untuk bergabung dalam pembelajaran tatap muka virtual
- b. Menggunakan pakaian seragam sesuai ketentuan sekolah masing-masing
- c. Tetap menyalakan video selama proses pembelajaran
- d. Fokus dan memperhatikan penjelasan guru selama proses pembelajaran
- e. Selalu meminta ijin apabila mau bertanya dan menanggapi pertanyaan
- f. Selalu menggunakan bahasa yang sopan dalam bertanya dan menanggapi pertanyaan

- g. Aktif dalam kegiatan diskusi kelompok atau tugas kelompok
- h. Siap menerima perintah dan menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tepat waktu

Proses penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio, dan/atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Namun dalam pembelajaran di masa pandemi proses penilaian keterampilan dilakukan dengan penilaian portofolio yaitu kumpulan tugas, dan proyek. Khususnya dalam tugas pembuatan proyek. Dimana peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok diarahkan untuk membuat tugas proyek sesuai dengan materi pembelajaran. Tugas tersebut didokumentasikan berupa video dan hasilnya dipresentasikan pada saat pembelajaran tatap muka virtual. Indikator tanggungjawab yang diharapkan tumbuh dalam penilaian keterampilan dengan tugas proyek yaitu:

- a. Menyelesaikan tugas masing-masing dengan tepat waktu dan maksimal
- b. Mengerjakan tugasnya dengan teliti, cermat dan tepat waktu
- c. Saling membantu satu sama lain
- d. Menerima saran dan kritikan dari orang lain

- e. Berpartisipasi aktif dalam kelompoknya
- f. Siap menerima perintah
- g. Selalu mencantumkan sumber informasi dalam tugas-tugasnya
- h. Mempertanggungjawabkan tugasnya dengan baik dihadapan guru dan teman-temannya.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, perencanaan penilaian pembelajaran PPKn di SMK Negeri Kota Bandung disusun bersamaan dengan pembuatan RPP yang disesuaikan dengan silabus dan kurikulum darurat (kebijakan sekolah masing-masing). Pelaksanaan penilaian pembelajaran PPKn dalam menumbuhkan sikap tanggungjawab pada peserta didik di masa pandemi covid-19 yaitu dengan menerapkan penilaian sikap dan penilaian keterampilan, dengan menekankan pada prinsip penilaian bersifat umpan balik. Penilaian sikap dilakukan dengan observasi pembelajaran virtual (*synchronous*) dan penilaian keterampilan dilakukan dengan penugasan dan proyek, yang hasilnya dipresentasikan dalam bentuk video.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari Suryanto. (2020). *Masa Pandemi, Begini Mekanisme Penilaian Terhadap Siswa*. Tersedia pada link. <https://radarlampung.co.id/2020/10/15/masa-pandemi-begini-mekanisme-penilaian-terhadap-siswa/>.
- Cahyono. (2015). *Kontribusi Penilaian Kinerja dalam Menanamkan Tanggungjawab Warga Negara*. Jurnal FKIP Uninus. Volum 2 No. 2 Tahun 2015
- Krisno, Turmudi, Nia Fatmawati. (2020). *Penilaian Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar Selama Masa Pandemi Covid-19*. Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak. Vol. 4 No. 1 Juli 2020, pp. 97-110
- Muh. Fitrah, Ruslan. (2020). *Eksplorasi Sistem Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran di Sekolah pada Masa Pandemi Covid-19 di Bima*. Jurnal Basicedu. Research & Learning in Elementary Education. Volume 5 Nomor 1 Halaman 178-187.
- Permendibud No. 53 Tahun 2020. *Panduan Penilaian Kurikulum 2013 Baru*. Jakarta
- Rustiadi, E. S dan Panuju D.R. (2008). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Crespent Press dan Yayasan Obor Indonesia.
- Syamsir Alam. (2020). *Penilaian dan Angka Rapor Pembelajaran Daring*. Tersedia pada <https://mediaindonesia.com/opini/322254/penilaian-dan-angka-rapor-pembelajaran-daring>. (2020; 20; 06).
- Thomas R Guskey. (2020). *Assessments And Grading In The Midst Of A Pandemic*. University of Louisville.